

KUALITAS KEPEMIMPINAN, ETOS MORALITAS PRIBADI, KOMPETENSI, DAN PELAYANAN PUBLIK

Dody Setyawan dan Nanang Bagus S.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi
Jl. Telaga Warna Blok C, Tlogomas, Malang 65144 Telp. (0341) 565500,
Fax. (0341) 565522

Abstract: Quality Leadership Ethos Private Morality, Competence, and the Public Service.

This study aims to determine the effect of leadership qualities, personal moral ethics, and competence in the performance of public services in East Java legislators. The method used is a quantitative method. The study population was a community that metropolis, traditional and civil society. Sampling was stratified random sampling and purposive sampling with as many as 115 respondents. Data collection techniques using koesioner, interviews, and observations. Data were analyzed with path analysis method with SPSS software. The results showed that the ethos of personal morality and competence indirectly influence on legislators public service through leadership qualities. To improve the quality of public service leadership legislators in leading the people it represents needs to be improved.

Keywords: performance, leadership qualities, personal morality ethics, competence, public service.

Abstrak: Kualitas Kepemimpinan Etos Moralitas Pribadi, Kompetensi, dan Pelayanan Publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas kepemimpinan, etos moral pribadi, dan kompetensi pada kinerja pelayanan publik anggota DPRD Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah masyarakat yaitu metropolis, tradisional dan masyarakat madani. Pengambilan sampel menggunakan metode *stratified random sampling* dan *purposive sampling* dengan responden sebanyak 115 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan koesioner, wawancara, dan observasi. Data dianalisis dengan metode path analysis dengan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etos moralitas pribadi dan kompetensi berpengaruh secara tidak langsung pada pelayanan publik anggota DPRD melalui kualitas kepemimpinan. Untuk meningkatkan pelayanan publik maka kualitas kepemimpinan anggota DPRD dalam memimpin rakyat yang diwakilinya perlu ditingkatkan.

Kata kunci: kinerja, kualitas kepemimpinan, etos moralitas pribadi, kompetensi, pelayanan publik.

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, ada 3 (tiga) peristiwa penting dalam perjalanan pembangunan di Indonesia. Pertama, bulan Mei 1998 terjadi perubahan iklim sosial politik yang sangat mendasar (reformasi 1998). Saat itu euforia reformasi berlangsung dimana-mana dan berujung dengan dilakukannya pergeseran/perubahan dalam paradigma pembangunan. Kedua, bulan Januari 2001, mulai diterapkannya kebijakan Otonomi Daerah sebagai upaya memajukan pembangunan di daerah melalui pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengelola rumah tangga di wilayah

masing-masing. Ketiga, bulan April 2009, rakyat atau bangsa Indonesia membe-rikan keputusan politik pada wakilnya yang akan duduk di lembaga Legislatif/DPRD, dengan segala pertimbangan kelebihan dan kekurangannya. Tiga peristiwa penting tersebut, tidak saja mengharuskan adanya strategi yang tepat dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan melainkan menuntut pula adanya sinergisitas dan komitmen kuat dari semua elemen yang terlibat, termasuk dalam hal ini adalah legislatif, eksekutif, partai politik, serta masyarakat. Para penentu kebijakan dituntut untuk tidak lagi mem-positisikan rakyat hanya tidak lebih sebagai

objek melainkan merupakan subjek dalam pembangunan, sehingga paradigma pembangunan telah bergeser dan menempatkan warga sebagai pemeran utamanya.

Sayangnya, beberapa survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga juga menunjukkan rapor buruk pelayanan publik di Indonesia dan salah satunya adalah hasil survey YAPPIKA (2006) tentang pelaksanaan desentralisasi menyebutkan bahwa pelayanan publik dinilai lebih buruk dari sebelum desentralisasi walaupun di beberapa daerah tertentu ada peningkatan kualitas dan kuantitas padanya. Pelayanan yang buruk itu ditandai dengan korupsi lebih besar, peningkatan biaya pelayanan tanpa ada persetujuan atau kesepakatan dengan masyarakat terlebih dahulu, tidak ada mekanisme komplain atas kinerja pemerintah dan ruang partisipasi terbatas. Lembaga Survei Indonesia (LSI) selama 2 tahun antara April 2004 sampai dengan Maret 2006, terhadap kinerja berbagai lembaga/institusi publik menyimpulkan bahwa DPR berpredikat sebagai lembaga yang berkinerja terburuk bersama partai politik dibandingkan dengan lembaga lain (Jawa Pos, 2006). Biasanya para politisi (anggota DPRD) hanya memikirkan kepentingan masing-masing, tidak banyak diantara mereka yang memikirkan rakyat yang memilihnya dalam pemilu, (Rusmiwari, 2011).

Senada dengan LSI, penelitian yang dilakukan Formappi terhadap kinerja DPR yang dimuat dalam Jawa Pos, (2006) bahwa wakil rakyat selama ini kurang menunjukkan keberpihakan yang jelas dan memadai terhadap kepentingan rakyat. Menurut Formappi, anggota dewan tidak menunjukkan kepekaan kepada rakyat, bahkan anggota justru semakin jauh dari rakyat. Hasil penelitian Formappi menginformasikan 51% responden berpendapat aspirasi masyarakat bawah (*grass root*) selama ini tidak terwakili. Bahkan secara tegas dikatakan saat ini tidak ada wakil rakyat yang sungguh-sungguh memperhatikan dan memperjuangkan nasib serta masa depan masyarakat.

Berdasarkan beberapa uraian sebagai-

mana tersebut diatas kiranya cukup menjadi alasan pembenar atas rumor yang berkembang di masyarakat. Jikalau demikian menjadi wajar apabila Kacung Marijan pun dengan meminjam istilah Jane Mansbridge lalu mempertanyakan kesungguhan komitmen anggota DPRD sebagai *promissory representation* dan *anticipatory representation* (Jawa Pos, 2006). Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas maka pertanyaan penelitiannya ini adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD (legislatif) Jawa Timur dalam pelayanan pada masyarakat.

Kinerja (performance) adalah hasil kerja atau hasil seseorang dengan pekerjaannya (Wibowo, 2012). Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Hasil penelitian Silaban (2011) menemukan tiga faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja. Dari ketiga faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, ditemukan bahwa faktor disiplin pegawai berpengaruh secara signifikan pada kinerja pegawai, sedangkan faktor kepemimpinan dan motivasi tidak berpengaruh secara signifikan pada kinerja pegawai. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Efendi (2011) bahwa faktor kinerja pegawai, selain dipengaruhi oleh kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja, juga dipengaruhi oleh faktor kepribadian dan kemampuan kerja. Variabel kemampuan kerja dipakai juga oleh Rita (2012) dengan arti yang sama dalam istilah kompetensi dalam penelitiannya tentang pengaruh kompetensi pegawai terhadap kinerja pegawai dan Nunuy (2010) dalam penelitiannya tentang kompetensi anggota DPRD. Dari penjabaran teori dan beberapa hasil penelitian tersebut, dapat diasumsikan bahwa kinerja pelayanan publik anggota DPRD (legislatif) dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan, etos moralitas pribadi dan kompetensi anggota legislatif. Mengacu pada asumsi tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas kepemimpinan, etos moralitas kepribadian, kompetensi pada kinerja pelayanan publik anggota DPRD (le-

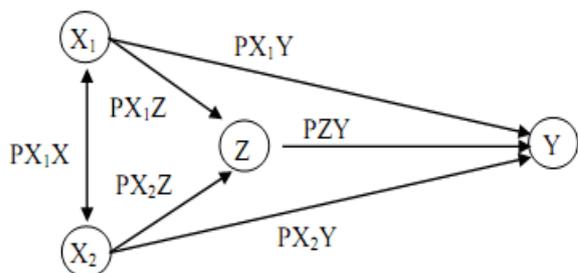
gislatif) Jawa Timur.

METODE

Lokasi penelitian di Jawa Timur yaitu: Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu) yang diwakili/diambil 3 (tiga) kabupaten/kota yang masing-masing daerah mewakili/ mencerminkan 3 (tiga) kelompok besar masyarakat Jawa Timur ditinjau dari aspek masyarakat, yaitu a). Metropolitan; b). Transisional, pariwisata, agrowisata; dan, c). Masyarakat madani (pondok pesantren), masyarakat pinggiran (*grass root*). Untuk itu pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling bertingkat yaitu *Stratified Random Sampling* dan *Purposive Sampling* yaitu merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian. Jumlah responden sebanyak 115 orang mewakili dari berbagai spektrum elemen masyarakat dari tiga lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini kuesioner yaitu dengan menggunakan pertanyaan gabungan tertutup yang disusun dalam bentuk pernyataan yang *favorable* (positif) secara berjenjang menurun ke pernyataan yang kurang bahkan tidak *favorable* (negatif). Responden diminta menentukan sikap dengan memilih alternatif jawaban yang tersusun dalam lima kategori jawaban. Untuk kevalidan data, pengumpulan data dilengkapi dengan teknik observasi, dan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data yang bersifat tidak langsung atau sekunder, serta interview bilamana didapati data yang kurang jelas.

Data dianalisis dengan menggunakan path analysis (analisa jalur) dengan software SPSS dan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Analisis jalur atau path analysis

Keterangan :

X1 : Etos Moralitas Pribadi

X2 : Kompetensi

Z : Kualitas Kepemimpinan

Y : Pelayanan Publik

Adapun rincian indikator dari setiap variabel pengukuran bisa dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Rincian indikator dari setiap variabel dimensi pengukuran

Dimensi	Rincian Indikator
Etos dan Moralitas Pribadi Anggota Legislatif (X1)	Berperilaku kemanusiaan Berperilaku jujur Memiliki rasa tanggung jawab Memiliki keseimbangan emosional dan kecerdasan emosional Lebih menekankan pengabdian Tangguh terhadap tekanan lingkungan
Kemampuan dan Kompetensi Anggota Legislatif (X2)	Mampu mengkomunikasikan visi Mampu merencanakan dengan baik Mampu mengkoordinasikan dengan baik Mampu menciptakan suasana yang lebih baik Paham good governance
Kualitas Kepemimpinan Anggota Legislatif (Z)	Memberdayakan masyarakat Memiliki hubungan terstruktur dengan masyarakat Menginternalisasi nilai bersama Memberikan dukungan Memiliki interaksi yang baik dengan bawahan
Pelayanan Publik (Prima) oleh Legislatif (Y)	Tanggap dalam pelayanan Tepat waktu Adil Efisien Keterbukaan Rasa aman Ada kepastian Prosedur jelas Pelayanan sesuai dengan kepentingan

HASIL

Etos Moralitas Pribadi

Tabel 1 Etos Moralitas Pribadi

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	69	10 %
Baik	242	35 %
Cukup	207	30 %
Kurang	47	18 %
Sangat kurang	11	7 %
Total	690	100 %

Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian

Dari tabel 1 di atas, terlihat bahwa 35% responden beranggapan bahwa anggota legislatif di daerahnya memiliki etos dan moralitas pribadi dengan kategori baik, dan 30% responden menjawab bahwa anggota legislatif termasuk dalam kategori cukup dalam kejujurannya.

Kompetensi

Tabel 2 dan Kompetensi

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	81	14 %
Baik	226	39 %
Cukup	192	33 %
Kurang	71	12 %
Sangat kurang	5	1 %
Total	575	100 %

Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa 39% responden menjawab bahwa kemampuan dan kompetensi anggota legislatif daerah termasuk dalam kategori baik. Sedangkan 33% responden yang menjawab bahwa kemampuan dan kompetensi anggota legislatif termasuk cukup.

Kualitas Kepemimpinan

Tabel 3 Kualitas Kepemimpinan

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat baik	118	17 %
Baik	290	42 %
Cukup	184	27 %
Kurang	82	12 %
Sangat kurang	16	2 %
Total	690	100%

Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian

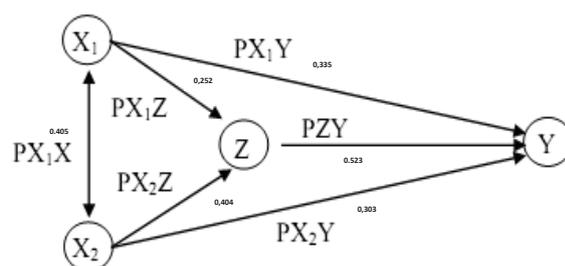
Sebanyak 36 % responden (tabel 3) menjawab bahwa kualitas kepemimpinan

yang ditunjukkan oleh anggota legislatif daerahnya termasuk dalam kategori baik, dan 37% responden menjawab bahwa kualitas kepemimpinan yang ditunjukkan oleh anggota legislatif daerahnya termasuk kategori cukup.

Berdasarkan hasil penelitian yang tersaji pada tabel 4 ternyata 47% responden menjawab bahwa pelayanan publik (prima) oleh anggota legislatif daerahnya termasuk ke dalam kategori baik, dan 29% responden yang lain menjawab termasuk ke dalam kategori cukup.

Hubungan Variabel

Dalam bagian ini data analisis jalur yang berupa angka-angka korelasi dimasukkan dalam skema analisis jalur pada gambar 2, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan software SPSS. Penggunaan analisis jalur berfungsi mengetahui apakah pengaruh variabel etos moralitas pribadi (X1) dan kompetensi (X2) secara langsung pada variabel pelayanan publik (Y) atau secara tidak langsung melalui variabel kualitas kepemimpinan (Z). Angka-angka korelasi dalam gambar 1, menunjukkan bahwa variabel X1 (etos moralitas pribadi) tidak bisa secara langsung mempengaruhi Y (pelayanan publik) yang tinggi, tetapi secara tidak langsung harus melalui variabel Z (kualitas kepemimpinan begitu pula variabel X2 (kompetensi) tidak bisa mempengaruhi secara langsung pelayanan publik (Y), tetapi harus melalui variabel kualitas kepemimpinan (Z). Jadi pengaruh kedua variabel independen (variabel etos moralitas pribadi dan kompetensi) pada variabel dependen (pelayanan publik) hanya dapat melalui variabel kualitas kepemimpinan.



Gambar 2. Analisis jalur atau path analysis

Keterangan :

X1 : Etos Moralitas Pribadi

X2 : Kompetensi

Z : Kualitas Kepemimpinan

Y : Pelayanan Publik

Secara keseluruhan, data hasil penelitian mengenai keempat dimensi beserta rincian indikatornya bisa dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa etos dan moralitas pribadi dari anggota legislatif dengan indikator berperilaku kemanusiaan ada pada kategori cukup, berperilaku jujur pada kategori baik, memiliki rasa tanggung jawab pada kategori kurang, memiliki keseimbangan emosional dan kecerdasan sosial pada kategori baik, menekankan pada unsur pengabdian pada kategori baik, dan

Tabel 5. Data keempat dimensi beserta rincian indikator hasil penelitian

Dimensi	Rincian Indikator	Kategori
Etos Moralitas Pribadi Anggota Legislatif (X1)	Berperilaku kemanusiaan	Cukup
	Berperilaku jujur	Baik
	Memiliki rasa tanggung jawab	Kurang
	Memiliki keseimbangan emosional dan kecerdasan emosional	Baik
	Lebih menekankan pengabdian	Baik
	Tangguh terhadap tekanan lingkungan	Cukup
Kompetensi Anggota Legislatif (X2)	Mampu mengkomunikasikan visi	Cukup
	Mampu merencanakan dengan baik	Cukup
	Mampu mengkoordinasikan dengan baik	Baik
	Mampu menciptakan suasana yang lebih baik	Baik
	Paham good governance	Cukup
Kualitas Kepemimpinan Anggota Legislatif (Z)	Memberdayakan masyarakat	Cukup
	Memiliki hubungan terstruktur dengan masyarakat	Baik
	Menginternalisasi nilai bersama	Baik
	Memberikan dukungan	Baik
	Memiliki interaksi yang baik dengan bawahan	Cukup
Pelayanan Publik Legislatif(Y)	Tanggap dalam pelayanan	Baik/Cukup
	Tepat waktu	Baik
	Adil	Baik
	Efisien	Baik
	Keterbukaan	Baik
	Rasa aman	Baik
	Ada kepastian	Baik
	Prosedur jelas	Baik
	Pelayanan sesuai dengan kepentingan	Baik

Sumber: data primer diolah dari hasil penelitian

tangguh terhadap tantangan lingkungan pada kategori cukup. Untuk dimensi kemampuan dan kompetensi anggota legislatif, indikator yang diteliti ialah memahami *good governance* pada kategori cukup, menciptakan suasana yang lebih baik pada kategori baik, merencanakan dengan baik pada kategori cukup, mengkoordinasi dengan baik pada kategori baik, dan mengkomunikasikan visi dengan baik pada kategori cukup. Indika-

tor dimensi kualitas kepemimpinan yang diteliti yaitu kualitas pemberian dukungan pada kategori baik, memberdayakan masyarakat pada kategori cukup, menginternalisasi nilai-nilai bersama pada kategori baik, memiliki hubungan terstruktur dengan masyarakat pada kategori baik, dan memiliki interaksi yang baik dengan bawahan pada kategori cukup. Untuk dimensi pelayanan publik yang prima meliputi 9 indikator,

yaitu tanggap dalam pelayanan pada kategori baik/cukup, pelayanan sesuai dengan kepentingan masyarakat pada kategori baik, tepat waktu pada kategori baik, adil pada kategori baik, efisien pada kategori baik, terbuka pada kategori baik, menciptakan rasa aman pada kategori baik, menciptakan rasa kepastian pada kategori baik, dan membangun prosedur yang jelas pada kategori baik.

PEMBAHASAN

Penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh anggota legislatif ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dari anggota legislatif itu sendiri, dan pada gilirannya kualitas kepemimpinan anggota legislatif itu ditentukan oleh etos moralitas pribadi dan kompetensi anggota legislatif. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa semua indikator dari dimensi pelayanan publik oleh anggota legislatif termasuk ke dalam kategori baik. Sebagian besar responden menyatakan bahwa dalam kesembilan indikator pada dimensi pelayanan publik oleh legislatif, anggota legislatif menunjukkan kategori yang baik. Persentase responden tertinggi yang memberikan kategori baik ialah pada indikator prosedur yang jelas dan memberikan kepastian. Ini menunjukkan bahwa salah satu kemajuan besar yang berhasil diciptakan oleh lembaga legislatif di daerah pada era reformasi saat ini ialah keberhasilan dalam membangun sistem prosedur yang jelas dalam pelayanan publik, dan hal ini berdampak pada meningkatnya rasa kepastian yang dirasakan oleh publik saat mendapatkan pelayanan publik.

Penilaian responden ini tentu merupakan kemajuan yang sangat berarti dalam kualitas kinerja lembaga legislatif. Pelayanan publik yang berwatak melayani dan responsif yang selama era Orde Baru menjadi sesuatu yang mewah berhasil diciptakan menjadi bagian dari pengalaman publik saat ini. Menurut salah seorang responden, anggota legislatif mampu membuat pelayanan publik menjadi mudah dipahami dan jelas. Hanya saja, salah satu indikator yang perlu

diperbaiki ialah pelayanan yang tepat waktu. Meski persentase terbesar responden menjawab baik, namun angkanya masih di bawah separo persentase total responden, yaitu hanya 39%. Ini menunjukkan bahwa bagian terbesar masih menganggap ketepatan waktu dalam pelayanan publik yang diberikan oleh anggota legislatif masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara, responden masih mempersoalkan kepastian dan ketepatan waktu pelayanan. Kualitas pelayanan publik yang dianggap baik oleh sebagian responden itu, berdasarkan hasil penelitian terutama disebabkan oleh kualitas kepemimpinan dari anggota legislatif. Berdasarkan hasil penelitian, dari lima indikator dalam dimensi kualitas kepemimpinan anggota legislatif, ada tiga indikator yang dinilai baik oleh sebagian besar responden, yaitu memiliki hubungan terstruktur dengan masyarakat, menginternalisasi nilai bersama, dan memberikan dukungan. Kebaikan dalam ketiga indikator ini ternyata terbukti mampu mendukung terciptanya kualitas pelayanan publik yang prima. Diantara ketiganya, indikator memiliki hubungan terstruktur dengan masyarakat ternyata merupakan indikator dengan persentase responden penilai yang tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki hubungan terstruktur yang kuat dengan masyarakat merupakan salah satu faktor penting agar bisa menciptakan kepemimpinan legislatif yang bagus dan pada akhirnya turut membentuk kualitas pelayanan publik yang prima.

Faktor apakah yang membuat kepemimpinan anggota legislatif menjadi baik?

Berdasarkan hasil penelitian untuk dimensi etos dan moralitas pribadi anggota legislatif, terlihat bahwa sebagian besar responden menjawab bahwa berperilaku jujur, menekankan pada pengabdian, dan memiliki keseimbangan emosional dan kecerdasan sosial ternyata termasuk kategori baik. Yang menarik bahwa meskipun menurut sebagian besar responden, anggota legislatif kurang memiliki rasa tanggung jawab, namun hal tersebut tak terlalu berdampak pada kualitas kepemimpinan anggota legislatif, dan kare-

na itu bisa diduga bahwa kebaikan dalam indikator berperilaku jujur, menekankan pada pengabdian, dan memiliki keseimbangan emosional dan kecerdasan sosial mampu mengimbangi kekurangan dari kepemilikan rasa tanggung jawab. Diantara ketiganya, keseimbangan emosional dan kecerdasan sosial merupakan yang terpenting di mata sebagian besar responden.

Untuk dimensi kompetensi, sebagian besar responden menjawab bahwa kompetensi anggota legislatif dalam mengkoordinasikan dan menciptakan suasana yang lebih baik termasuk kategori bagus. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat daerah saat ini dimana ada berbagai kepentingan yang harus dipenuhi dan diseimbangkan pemenuhannya, kemampuan anggota legislatif dalam mengkoordinasikan semua kepentingan itu serta untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif buat berbagai kepentingan itu merupakan faktor kunci bagi keberhasilan kepemimpinan anggota legislatif dan pada akhirnya buat terciptanya pelayanan publik yang prima. Dari kedua indikator itu, yang mendapatkan penilaian paling banyak dari responden ialah kompetensi anggota legislatif dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) karena pemahaman mengenai *good governance* merupakan salah satu indikator kompetensi dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa kompetensi menjadi faktor krusial bagi anggota legislatif guna menciptakan pelayanan publik yang prima bagi publik di era reformasi pemerintahan yang baik (*good governance*). Berbeda dengan penelitian Nunuy (2010) tentang kompetensi anggota DPRD dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, menemukan bahwa kontribusi atau sumbangan kompetensi anggota DPRD pada pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sangat kecil sekali (0,01%). Masih sangat lemahnya pengaruh kompetensi anggota DPRD pada pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik, harus mendapat perhatian yang serius karena fungsi anggota DPRD sebagai representasi

rakyat mempunyai peranan yang penting dalam melindungi kepentingan rakyat atau pelayanan publik.

SIMPULAN

Hasil penelitian dari tiga variabel yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik anggota DPRD Jawa Timur, secara umum variabel kualitas kepemimpinan dan etos moralitas pribadi termasuk kategori baik, sedangkan variabel kompetensi hanya termasuk kategori cukup baiknya etos moralitas pribadi ditandai dengan baiknya perilaku kemanusiaan, keseimbangan emosional dan lebih mementingkan pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya baiknya kualitas kepemimpinan anggota DPRD ditandai oleh hubungan struktur dengan masyarakat, internalisasi nilai-nilai bersama dan memberi dukungan pada masyarakat, sedangkan kompetensi anggota DPRD dari sisi lemahnya ditandai kurang mampu dalam perencanaan, komunikasi dan pemahaman dalam *good governance* pengaruh variabel etos moralitas pribadi dan kompetensi pada variabel kinerja pelayanan publik secara langsung sangat lemah. Tetapi secara tidak langsung melalui variabel antara yaitu kualitas kepemimpinan, ternyata cukup kuat dengan korelasi (r) sebesar 0,523. Data ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik anggota DPRD maka variabel kualitas kepemimpinan anggota DPRD dalam memimpin rakyat yang diwakilinya merupakan variabel penentu yang perlu ditingkatkan.

Pelayanan publik yang prima bisa diciptakan oleh anggota legislatif manakala anggota legislatif memiliki kualitas kepemimpinan yang bagus terutama dalam hal memiliki hubungan terstruktur yang kuat dengan masyarakat. Hubungan terstruktur yang kuat memungkinkan anggota legislatif untuk memahami nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat dan memungkinkan anggota legislatif untuk mengetahui kualitas pelayanan publik prima seperti apa yang harus diberikannya kepada publik. Untuk bisa memiliki hubungan ter-

struktur yang kuat dengan masyarakat, maka seorang anggota legislatif harus memiliki etos moralitas yang bagus terutama dalam hal keseimbangan emosional dan kecerdasan sosial, dan memiliki kompetensi yang baik terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR RUJUKAN

Efendi Sinuhaji. 2011. Analisis Pengaruh Kepribadian, Kemampuan Kerja, dan Motivasi Terhadap Kinerja SDM Outsourcing Pada PT. Catur Karya Sentosa Medan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, II (2).

Jawa Pos. 2006, 13 Maret. Hasil penelitian Formappi terhadap kinerja DPR. Hlm. 4

Kacung Marijan. 2009, 24 Maret. Opini, Ironi Wakil Rakyat. Jawa Pos, Hlm. 4.

Nunuy Nur Afiah. 2010. Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akutansi, Penganggaran Serta Kualitas Informasi Keuangan

Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik: Survey Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Sosiohumaniora*, 12 (1).

Pantas H Silaban. 2011. Sumber Daya Pariwisata Sebagai Keunggulan Bersaing Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, II (2).

Rusmiwari, Sugeng. 2011. Korelasi Perilaku Arogansi Legislatif Terhadap Sikap Apatisme Masyarakat. Diterbitkan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. *Jurnal Reformasi*. 1 (1).

Rita Kardinasari. 2012. Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Civil Service*, 6 (2).

Suara Merdeka. 2006, 24 Maret. Kinerja Parpol Paling Buruk. Hlm. 16.

Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja. Jakarta. Rajawali Pers

Zen, A. Patra M. 2006. Pelayanan Publik Bukan Untuk Publik. Malang. Hasil Penelitian Kerja sama Malang Corruption Watch dengan YAPPIKA.